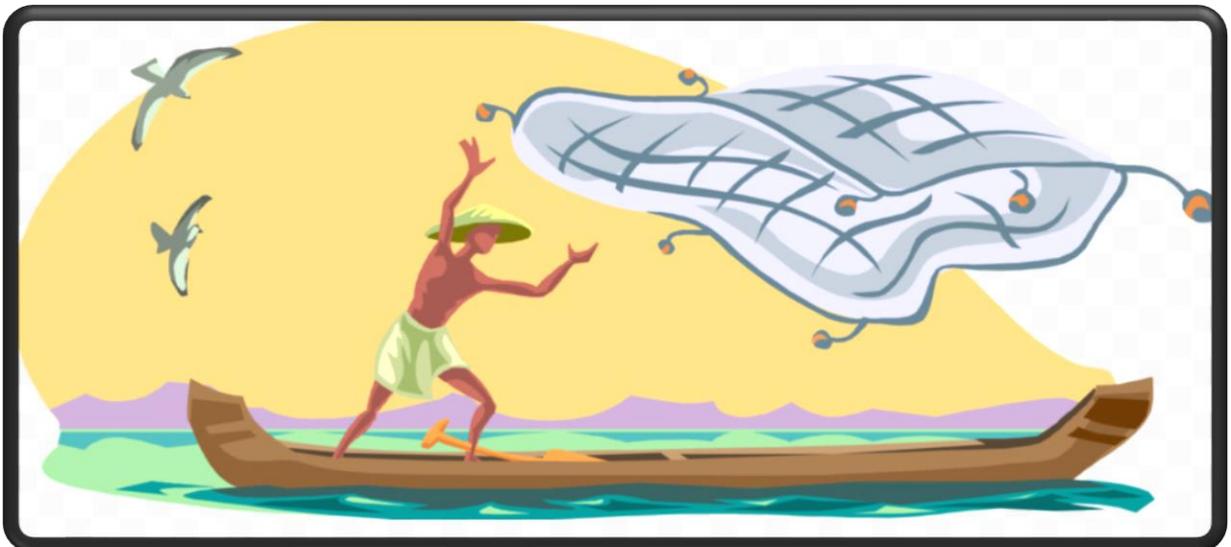


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2021**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk Pertanggung jawaban Dinas dalam mengemban amanah pembangunan sepanjang satu tahun anggaran, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021.

Dalam laporan ini termuat data tentang kondisi wilayah, kondisi Dinas baik personil maupun sarana dan prasarana penunjang, data kegiatan APBD, Renstra Dinas, data tentang pencapaian sasaran program, serta berbagai hambatan / tantangan dihadapi oleh Dinas dan saran-saran untuk perbaikan selanjutnya.

Keberhasilan dalam mengemban tugas-tugas Dinas tersebut adalah berkat peran aktif dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar serta partisipasi dari pihak nelayan/pembudidaya Ikan, pihak swasta dan stakeholder lainnya. Karena itu sepantasnyalah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang turut membantu, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan ini tentu banyak hal yang telah kita kerjakan, tetapi masih banyak pula, hal kekurangan dan hal yang belum sempat dikerjakan. Untuk itu diperlukan pembenahan secara bertahap dan simultan serta kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak terkait, sehingga apa yang di cita-citakan oleh pemerintah kita bersama sesuai dengan harapan dan semoga dengan masih adanya kelemahan dan kekurangan ini, menjadi spirit untuk dapat dijadikan bahan perbaikan selanjutnya. Wassalam.

Polewali, 05 Januari 2022


Kepala Dinas,
H. MUHAMMAD AKBAR, S.IP. M. SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP . 19710528 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan.....	4
1.1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.1.3. Kondisi Organisasi.....	6
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
1.2.1. Kondisi Kepegawaian.....	8
1.2.2. Personalia.....	8
1.2.3. Data Kepegawaian.....	10
1.2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang.....	11
1.2.5. Sarana dan Prasarana.....	13
BAB II.....	18
PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. Rencana Strategis.....	18
2.1.1. Indikator Kinerja.....	19
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2020.....	21
BAB III.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	24
3.1. Akuntabilitas.....	24
3.1.1. Evaluasi terhadap sasaran Meningkatnya Pembangunan Sektor Perikanan pada capaian Indikator kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADHK).....	29
3.1.2. Evaluasi terhadap sasaran meningkatnya produksi dan Produktivitas Perikanan.....	32
3.1.3. Evaluasi terhadap sasaran meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.....	40
3.1.4. Evaluasi terhadap sasaran meningkatkan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.....	43
3.1.5. Akuntabilitas Keuangan.....	47
3.2. Masalah dan Solusi.....	55
3.2.1. Masalah.....	55
3.2.2. Solusi.....	56
BAB IV.....	58
PENUTUP.....	58
3.1. Kesimpulan.....	58
3.2. Saran.....	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dilaporkan setiap Tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan potensi yang ada dan diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk pembangunan tahun berikutnya sehingga pola pembangunan sektor Kelautan dan perikanan akan di sesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah serta arahan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019. LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 merupakan laporan tahun Pertama periode RPJMD 2020-2025 dalam rangka mewujudkan Empat pilar pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan (Pro Poor), penyerapan tenaga kerja (Pro job), pertumbuhan (Pro growth) dan pemulihan serta pelestarian lingkungan (Pro Environment).

Pelaksanaan Pembangunan Perikanan di tingkat Kabupaten Polewali Mandar diarahkan untuk mewujudkan Misi Kedua Kabupaten Polewali Mandar yaitu “Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah” dengan sasaran “Meningkatnya Peran Sektor Kelautan dan Perikanan’.

Untuk urusan Perikanan dan Kelautan merupakan urusan Bidang Penunjang : diarahkan untuk meningkatkan peran serta Masyarakat Perikanan melalui peningkatan kualitas SDM Perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Nelayan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan hidup.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pembangunan Perikanan telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2025. Dalam dokumen Perencanaan Strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang direncanakan pertahun serta rencana indikasi Pendanaannya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Perikanan sebagai unit kerja Pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen



pemerintah dengan menuntut azas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 dan UU No. 28 tahun 1999 dimana diisyaratkan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme merupakan perhatian pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menindaklanjuti aturan tersebut pemerintah mendorong terwujudnya good governance di kalangan instansi pemerintah dengan menerbitkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perubahan paradigma baru dalam pelaksanaan pemerintahan, menuntut peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja dari aparat pemerintah, dalam mengembang Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi dari instansi pemerintah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah membawa perubahan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dibanding dengan Sistem Perencanaan sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain terletak pada dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan selama ini. Sebelumnya, di tingkat daerah dikenal dokumen perencanaan berupa Pola Dasar atau Garis-garis Besar Haluan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah, Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang rentang waktu berlakunya masing-masing lima tahun. Kemudian oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2004, dikenal dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang rentang waktu berlakunya dua puluh tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang rentang waktu berlakunya lima tahun.



Undang-undang No. 25 Tahun 2004, mencoba membenahi kelemahan pada system perencanaan sebelumnya dengan mengintegrasikan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah secara bersamaan. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme penyusunan dan penetapan perencanaan yang pada ujungnya diharapkan agar permasalahan daerah dan nasional baik melalui dokumen perencanaan daerah maupun melalui dokumen perencanaan nasional dapat dijawab melalui arah pembangunan yang ditetapkan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 dan ditidakanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2004 bahwa salah satu piranti dari good governance yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pertanggung jawaban secara tertulis semua tugas pemerintah yang diemban. Dalam laporan ini dipresentasikan profil dari instansi, perencanaan strategis dan evaluasi pencapaian kinerja, dari setiap program yang dilaksanakan.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana beberapa hal telah di ubah, terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berintikan pada pemberian otonomi kepada daerah dalam menyelenggarakan berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota telah diawali dengan penetapan organisasi pemerintah kabupaten dengan membentuk Dinas, Badan dan Kantor.

Potensi kelautan dan perikanan di kabupaten polewali mandar memiliki sumber daya yang cukup besar dengan luas wilayah perairan ± 869,21 Km², Luas Wilayah Perairan Payau/Tambak 5,123,32 Ha dan Luas Wilayah perairan Daratan (Kolam, Mina Padi dan Genangan Air lainnya) ± 316.15 Ha, namun demikian tingkat pemanfaatannya belum optimal (relatif masih minim), oleh karenanya prospek pengembangan kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang masih cukup besar. Dengan melihat betapa besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan ini, maka diperlukan upaya strategis agar potensi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,



untuk itulah bagian dari pentingnya lakip sebagai upaya untuk memberi laporan secara periodik agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan.

1.1.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019;



9. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;
11. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang. Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.

1.1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun kepada Bupati Polewali Mandar. Maksud penyusunan LAKIP Tahun 2021 ini adalah bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada Bupati Polewali Mandar atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.



1.1.3. KONDISI ORGANISASI

○ STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12), Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat yang membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

3. Bidang Perikanan Budidaya:

- Seksi Produksi Budidaya
- Seksi Sarana dan Prasarana Produksi
- Seksi Karantina dan Pengendalian Sumber Daya Ikan

4. Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir:

- Seksi Produksi Perikanan Tangkap
- Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan
- Seksi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan:

- Seksi Informasi dan Inovasi Teknologi Perikanan
- Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pendataan
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP):



- Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan
- Seksi Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
- Seksi Penguatan Daya Saing Produk dan Non Produk Perikanan

7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) yaitu:

- UPTD Balai Budidaya Air tawar (BBAT)
- UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- UPTD Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP)
- UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP).

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12), telah dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, Tugas Pokok dan Fungsi sbb:

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi:

o **Tugas Pokok:**

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kelautan dan perikanan
2. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan peraturan untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.



- **Fungsi:**

Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan dan ketahanan pangan
2. Pengelolaan dan fasilitas dibidang perikanan dan ketahanan pangan
3. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perikanan dan ketahanan pangan.
4. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perikanan dan ketahanan pangan.
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1. KONDISI KEPEGAWAIAN

Adapun jenjang jabatan struktural yang tersedia pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas dengan jabatan setingkat Eselon II.b
- b. Sekretariat dengan jabatan setingkat Eselon III.a
- c. Kepala Bidang Sebanyak 4 Bidang dengan jabatan setingkat eselon III.b
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebanyak 14 jabatan dengan jabatan setingkat Eselon IV.a
- e. UPTD masing-masing setingkat dengan Eselon IV.a sebanyak 9 jabatan

1.2.2. PERSONALIA

- **Formasi dan Bezetting**



Ratio perimbangan antara Formasi dan bezetting sampai pada akhir tahun 2021 belum terpenuhi untuk uraian selengkapnya pada daftar berikut:

Tabel 1.1 Perimbangan Formasi dan Bezetting Personil DKP Tahun 2020

No.	TINGKAT/JABATAN	ESELON	Formasi	Bezetting	(%)
1	KABUPATEN		91	91	76,53 100
	1.1. Kepala Dinas	II.b	1	1	100
	1.2. Sekertaris	III.a	1	1	100
	1.3. Kepala Bidang	III.b	4	4	100
	1.4. Kasi /sub bagian	IV.a	14	14	100
	1.5. Staf	-	14	14	64,62
	1.6. Tenaga Sukarela	-	57	57	
2.	UPTD BBAT/BBI		9	9	100
	2.1. Kepala UPTD		1	1	100
	2.2. Kasubag TU	IV.a	1	1	100
	2.3. Staf	IV.b	1	1	100
	2.4. Tenaga Sukarela	-	6	6	100
3.	UPTD BBIP		6	3	75
	3.1. Kepala UPTD		1	-	0
	3.2. Kasubag UPTD		1	1	100
	3.3. Staf	IV.a	-	-	0
	3.4. Tenaga Sukarela	IV.b	4	4	100
4.	UPTD PPI/TPI		7	8	100
	4.1. Kepala UPTD		1	1	100
	4.2. Kasubag UPTD		1	1	100
	4.3. Staf	IV a	1	1	100
	4.4. Tenaga Sukarela	IV.b	4	4	100
5.	UPTD BMHP		2	1	14,28
	5.1. Kepala UPTD		1	-	0
	5.2. Kasubag UPTD		1	1	100
	5.3. Staf		-	-	0
	5.4. Tenaga Sukarela	IV a	-	-	0
		IV.b			
		-			
		-			



J U M L A H	115	112	76,56
--------------------	-----	-----	-------

Ket. - Bezetting Pegawai yang tergambar di atas, dirasakan masih kurang dan belum terpenuhi sesuai dengan formasi yang ada, dan untuk mengisi kekosongan tersebut, ditempuh dengan menempatkan, memanfaatkan tenaga honor dan tenaga sukarela untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

- Penempatan tenaga dicapai rata-rata 76,56%.

1.2.3. DATA KEPEGAWAIAN

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan (Ijasah terakhir), termasuk tenaga sukarela sebagai berikut:

Pasca Sarjana	6 Orang	14,63%
Sarjana S.1 Perikanan/non Perikanan	31 Orang	75,60%
Sarjana Muda / Dipl III Perikanan	4 Orang	9,75%
SLTA (SPMA, SMA, SMEA)	2 Orang	4,87%
Jumlah	43 Orang	100%

Jumlah Tenaga Kontrak / sukarela menurut ijazah sebagai berikut :

Sarjana S.1 Perikanan/non Perikanan	24 Orang	42,10%
Sarjana Muda / Dipl III Perikanan	4 Orang	7,01%



SLTA (SPMA, SMA, SMEA)	27 Orang	45,61,43%
SMP	1 Or	1,54%
SD	1 Or	1,54%
Jumlah	57 Orang	100%

Tabel 1.2 Jumlah pegawai struktural menurut pangkat /golongan / ruang (termasuk sukarela).

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	(%)
1.	IV/c	1	1,32
2.	IV/b	2	4,65
3.	IV/a	3	6,97
4.	III/d	16	37,20
5.	III/c	7	16,27
6.	III/b	6	13,95
7.	III/a	8	18,60
8.	II/d	-	-
9.	II/c	-	-
10.	II/b	-	-
11.	II/a	-	-
12.	Honorer	57	59,82
	Jumlah	100	100

Pada Tabel disamping ini tergambar bahwa jumlah seluruh staf dinas kelautan dan perikanan termasuk didalamnya tenaga honorer adalah 100 orang yang terdiri dari 43 orang berstatus pegawai negeri sipil dan 57 orang berstatus honorer/sukarela dengan prosentase 43% adalah pegawai negeri sipil dan 57% dari tenaga non pegawai negeri sipil. Tertinggi

Dari tabel diatas juga tergambar bahwa komposisi prosentase Terberdasarkan kepangkatan adalah pada tingkatan golongan III/d sebesar 10,71%. Hal ini memberi indikasi bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan komposisi kepegawaiannya didominasi dari golongan III.

1.2.4. KONDISI SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG



○ **LUAS AREAL PEMELIHARAAN DAN PENANGKAPAN IKAN (TAHUN 2021)**

Luas areal pemeliharaan dan penangkapan ikan dirinci per kecamatan di kabupaten polewali mandar tahun 2021 (dalam Ha) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Luas Areal Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan di Kabupaten Polewali Mandar 2021.

Kecamatan	PEMELIHARAAN / Budidaya (Care)				PENANGKAPAN (Keep)		
	Kolam	Tambak	Sawah	Rumla	Rawa	Sungai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
01. Tinambung	1,56	368,60	-	-	-	-	385,72
02. Balanipa	1,07	-	-	-	-	-	1,07
03. Limboro	2,61	-	-	-	-	-	2,61
04. Tutar	5,11	-	-	-	-	-	5,11
05. Allu	17,26	-	-	-	-	-	17,26
06. Campalagian	57,30	3.138,68	2,37	-	-	-	3.198,35
07. Luyo	52,94	-	2,37	-	-	-	55,32
08. Wonomulyo	172,36	11.069,78	11,10	3.328,11	-	-	14.581,34
09. Mapilli	81,13	2.387,15	1,45	-	-	-	2.649,72
10. Tapango	93,11	-	4,90	-	-	-	98,01
11. Matakali	122,54	2.664,60	9,54	-	-	-	2.796,68
12. Polewali.	65,28	998,28	3,95	7.970,86	-	-	9.038,37
13. Binuang	82,52	1.532,50	4,04	1.642,05	-	-	3.261,11
14. Anreapi	88,66	-	12,19	-	-	-	100,85
15. Matangnga	101,43	-	15,85	-	-	-	117,27
16. Bulu	76,52	-	5,63	-	-	-	82,15
Jumlah Total	1.021,39	22.175,15	73,38	12.491	-	-	36.210,94

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021



Pada tabel 3 tersebut diatas tergambar bahwa luas areal pemeliharaan budidaya perikanan di Kabupaten Polewali Mandar terbesar dari sektor budidaya air payau / tambak dengan luas sebesar 22.175,15 ha yang tersebar di 7 kecamatan Wonomulyo (11.069,78), Campalagian (3.138,68), Matakali (2.664,60), Mapilli (2.387,15), Binuang (1.532,50), Polewali (998,28), Tinambung (384,15). Budidaya rumput laut di Polewali Mandar seluas 12.491,02 Ha tersebar di empat kecamatan yang eksisting Binuang (1.642,05), Polewali (7.970,86), Wonomulyo (3.328,11). Sektor Budidaya air tawar terdapat kolam seluas 1.021,39 ha tersebar di seluruh kecamatan di Polewali Mandar yaitu Wonomulyo (172,36), Matakali (122,54), Matangnga (101,43), Tapango (93,11), Anreapi (88,68), Binuang (82,52), Mapilli (81,13), Polewali (65,28), Campalagian (57,30), Luyo (52,94), Alu (77,26), Tutar (5,11), Limboro (2,61), Tinambung (1,56), Balanipa (1,07). Sawah/minapadi seluas 73,38 ha tersebar di Sebelas kecamatan yakni; Matangnga (15,85), Wonomulyo (11,10), Matakali (9,54), Bulu (5,63), Luyo (2,37), Tapango (4,90), Campalagian (2,37), Mapilli (1,45), Binuang (4,04), Anreapi (15,85), Polewali (3,95).

1.2.5. SARANA DAN PRASARANA

○ SARANA UMUM

Untuk memperlancar hubungan barang dan jasa dari produsen ke konsumen diperlukan alat transportasi sebagai sarana penunjang dalam hal ini angkutan darat dan angkutan laut/air. Dari kedua bentuk transportasi tersebut maka jalan darat lebih dominan digunakan walaupun keadaan jalan di beberapa daerah masih relatif kurang baik. Hal ini disebabkan biaya angkutan jalan darat masih lebih murah dan lebih cepat. Disamping itu bagi penduduk pesisir dan pulau-pulau umumnya menggunakan perahu tanpa motor maupun dengan motor tempel sebagai sarana angkutan serta dapat memperlancar jalur ke lokasi tambak percontohan khususnya dan masyarakat pembudidaya pada umumnya.

○ SARANA PERIKANAN



- **Tempat Pendaratan Ikan (TPI)**

Salah satu sarana yang sangat penting dan menunjang usaha nelayan/petani ikan dalam memasarkan hasil produksi mereka adalah tersedianya Tempat Pendaratan Ikan (TPI/PPI). Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar memiliki 1 Unit Pendaratan ikan yakni TPI/PPI Lantora yang terletak di Kecamatan Polewali yang saat ini sudah dimanfaatkan dan masih akan terus dilengkapi fasilitasnya hingga sarananya lengkap.

- **Pabrik Es**

Es selain dimanfaatkan sebagai konsumsi masyarakat juga untuk bahan pengawet ikan. Dalam bidang perikanan, es digunakan untuk mempertahankan mutu hasil perikanan. Pabrik es yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sampai Tahun 2021 sebanyak 3 unit dengan Kapasitas produksi rata-rata 10 Ton/Hari dan yang terjual 6 ton/hari.

- **Pengawetan dan Pengolahan**

Pengawetan dan pengolahan merupakan perlakuan pada hasil-hasil perikanan agar mutu dapat dipertahankan dan diupayakan untuk memberikan nilai tambah. Ada beberapa Teknik pengawetan ikan seperti : Pengeringan, Penggaraman dan Pengasapan yang telah lama dikenal masyarakat di daerah ini, sedangkan metode pengolahan ikan seperti : Pembuatan tepung ikan, pengolahan rumput laut menjadi jus rumput laut, pembuatan kecap ikan, ikan pindang serta pembuatan minyak ikan belum begitu dikenal. Kegiatan pengawetan dan pengolahan umumnya merupakan home industri, terutama dilakukan pada waktu hasil tangkapan melimpah dan salah satu jenis hasil olahan yang sudah banyak diusahakan yakni : Pembuatan Nugget, Tumpi-Tumpi dan Abon Ikan.

- **Balai Benih Ikan (BBI)**



Balai Benih Ikan yang ada sekarang ada 1 Unit yaitu Balai Benih Ikan di Seppong. Balai Benih Ikan (BBI) Seppong sudah memproduksi dan diharapkan mampu mensuplai benih ikan air tawar dan sumber PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Polewali Mandar. Produksi benih Ikan BBI akan disalurkan/disebar pada daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan kolam, minapadi, Keramba Jaring Apung serta Kolam air deras. Selain BBI yang dimiliki dinas sebagai tempat pembenihan juga terdapat tujuh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, namun sampai saat ini UPR tidak berfungsi dengan baik dikarenakan.

- **Depot Rumput Laut**

Depot rumput laut dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 untuk menunjang kegiatan pengolahan dan pemasaran budidaya rumput laut. Sarana dan prasarana Depo terdiri dari : Gudang Depo, Lantai Jemur, Gedung Penyimpangan Alat dan sarana penunjangnya terdiri dari : Alat Press Rumput Laut, Timbangan dan Alat Penjemuran (Para-Para). Depo Rumput Laut saat ini sudah dikelola oleh koperasi namun demikian pengelolaannya belum optimal karena masih terbatas kendala permodalan dan koperasi tersebut baru terbentuk sehingga fokus utama adalah pembenahan manajemen. Pengelolaan Depo Rumput Laut di kelola oleh Kopresi Karya Bersama Depo Rumput Laut. Namun Untuk Tahun 2021 pengelolaan rumput laut tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan oleh tidak adanya investor yang ingin memasarkan rumput laut sehingga kelompok pembudidaya rumput laut hanya memasarkan rumput lautnya ke para pengusaha dan tengkulak dan ada juga kelompok pembudidaya rumput laut yang memiliki kerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang usaha budidaya rumput laut. Depo rumput laut saat ini hanya dijadikan sebagai tempat pengolahan dan pengeringan ikan teri dan dipasarkan ke daerah – daerah di luar kabupaten Polewali Mandar.



- **Pasar Ikan Tradisional**

Jumlah pasar ikan tradisional di kabupaten polewali mandar ada 8 pasar yang tersebar di tujuh kecamatan, ada dua pasar yang di bangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yakni Pasar Ikan TPI Lantora (60 lods) dan Pasar Ikan Campalagian (60 lods). Kehadiran pasar ikan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian sektor kelautan dan perikanan

- **Sarana dan Alat Penangkapan Ikan**

Jumlah Perahu Tanpa Motor (PTM) 2.449 Unit, Motor Tempel (MT) 1.138 Unit. Kapal Motor (KM) \leq 5 GT 551 Unit, kapal Motor \geq 5 GT 248 Unit, Jumlah Rumpon 162 Unit, Jumlah Alat tangkap sebesar 6.453 Unit terdiri dari Gill Net 636 Unit, Purse Seine 281 Unit, pukat Pantai 785, Bagan Perahu 60 Unit, Bagan Tancap 54 Unit, Pancing Tonda 281 Unit, Rawai 729 Unit Payang 413. Unit Pancing Ulur 2.675 Unit Tombak 10. Unit Bubu 165 Unit, Sero 9 Unit, Sesar 210 Unit Unit dan Lain – lain 145 Unit.

- **Sarana Budidaya (Tambak, dan Budidaya Rumput Laut)**

Luas Potensi Tambak di Polewali Mandar Berdasarkan Master Plan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 seluas 7.115,75 Ha dan yang eksisting seluas 5.123.23 Ha. Panjang Saluran Tambak tersier sampai tahun 2017 136,03 km, Saluran Tambak skunder 15,20 Km dan Saluran Primer 6,40 Km, Jumlah Karamba Jaring Apung 36 unit dan luas wilayah produktif KJA 1.624 Ha, Potensi Budidaya rumput laut di Polewali Mandar Berdasarkan Master Plan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 \pm 5.641,79 ha dan yang termanfaatkan sampai tahun 2017 sebesar 6.940 Ha (123,01 %)

- **Sarana Pembekuan Ikan (Cold Storage)**

Cold Storage dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2015 untuk menunjang kegiatan pengolahan dan pemasaran, dimana kapasitas penampungan ikan sebanyak 50 Ton, dan dilengkapi dengan alat pembeku ikan dengan kapasitas



3 Ton/hari, serta alat pendingin dengan kapasitas 45 Ton. Pembangunan Cold Storage ini dibiayai dengan sumber dana dari APBN (Tugas Pembantuan).

○ **Sarana Pengolahan Ikan (Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan/PPDI)**

Sebagai upaya untuk mendapatkan mutu hasil produksi perikanan yang lebih baik dan higienis maka Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 telah membangun sarana Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) yang dibiayai dari Sumber dana APBN-TP Tahun Anggaran 2015.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap serta sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (Renstra) disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang berorientasi terhadap hasil, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dilandasi oleh visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2024 merupakan rangkaian implementasi ditingkat Satuan Kerja Perangkat daerah dari arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar. Berangkat Dari Visi dan Misi pemerintah baru Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2020 yang dituangkan dalam RPJMD 2019-2024, maka Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Rencana Strategis untuk mewujudkan pencapaian pembangunan lima tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, di dalam dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2019-2024 telah ditetapkan sasaran yang



ingin dicapai pada akhir periode tahun 2021 dan setiap tahunnya akan dilakukan penetapan kinerja untuk mencapai sasaran dimaksud.

Dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kelautan dan Perikanan mengemban Misi Kedua Kabupaten Polewali Mandar yaitu “Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah”.

Sasaran kinerja yang terukur telah dirumuskan dan ditetapkan kedalam 7 (tujuh) sasaran dalam rangka pencapaian misi kabupaten polewali mandar sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi perikanan Budidaya.
2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan pesisir.
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan fasilitas kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
4. Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
5. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja.
7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

2.1.1. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu: specific (jelas), measurable (dapat diukur), agreeable (dapat disetujui), realistic (dapat dicapai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level outcome (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan		Persentase Laju Pertumbuhan PDRB, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,40%	10,80%	12,20%	13,60%	15%	16,40%
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	26.250	28.325	30.925	33.525	35.625	38.275
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan pesisir	Jumlah Produksi perikanan tangkap dan pesisir	25.515	25.642	25.770	25.889	26.029	26.161
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan fasilitas kelompok nelayan dan pembudidaya ikan	Persentase Kelompok Nelayan dengan kapasitas memadai	90%	92%	84%	96%	98%	98%
		Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	30%	35%	40%	45%	50%	50%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Keuangan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun isi dari perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 terdiri dari 6 (enam) Sasaran, dan 6 (enam) Indikator Kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 terdiri atas 6 (Enam) sasaran strategis dan terdapat 6 indikator kinerja yang dilengkapi dengan satuan dan target yang ingin dicapai tahun anggaran 2021 sebagai berikut:



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	30.925 Ton
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Pesisir	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	25.770 Ton
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Fasilitas Kelompok Nelayan Dan Pembudidaya Ikan	Persentase kualifikasi kelas kelompok nelayan memadai	94%
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	40%
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

Tabel 2.3 Target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dan 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	30.925 Ton	36.315 Ton	33.525
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	25.770 Ton	26.896 Ton	25.889
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Fasilitas Kelompok Nelayan Dan Pembudidaya Ikan	Persentase kualifikasi kelas kelompok nelayan memadai	94%	94%	96%
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	40%	40%	45%
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	A



Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp7.689.423.161,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 kegiatan yang terangkum dalam 4 program. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Program dan Alokasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1.424.898.800	19%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1.712.908.000	22%
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Fasilitas Kelompok Nelayan Dan Pembudidaya Ikan	Persentase kualifikasi kelas kelompok nelayan memadai	-	
4	Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	291.798.350	40%
5	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder	4.259.818.011	55%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah		
Jumlah			7.689.423.161	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. AKUNTABILITAS

Program dan kegiatan yang akuntabel hanya bisa diwujudkan jika dalam pelaksanaannya suatu kegiatan bersifat transparan, bekerja berdasarkan kaidah serta memiliki komitmen dalam melaksanakannya. Namun demikian tiga hal tersebut tidaklah cukup jika pencapaian suatu kinerja tidak dapat diukur, oleh sebab itu pengukuran kinerja menjadi penting dalam pencapaian akuntabilitas. Pengukuran capaian kinerja adalah nilai capaian yang diperoleh dari perbandingan antara indikator kinerja (rencana) dengan indikator kinerja (realisasi) dalam bentuk prosentase masing-masing yang tercantum pada program/kegiatan. Pencapaian sasaran yang diukur dengan indikator kinerja menjadi sangat penting untuk melihat keberhasilan suatu pembangunan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Dalam Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2021 telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dan terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang dilengkapi dengan satuan dan target yang ingin dicapai. Target yang ingin dicapai berdasarkan indikator itu tertuang kedalam 4 (empat) program.

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pada tahun (2021) **ditargetkan sebesar 25.770 Ton/thn** atau naik 1.126 ton/thn dari tahun lalu sebesar 26.896 ton/thn. Penetapan ini didasarkan pada prakiraan laju pertumbuhan produksi pertahun dan dukungan program peningkatan produksi perikanan tangkap dengan dana sebesar Rp1.712.908.000 Diharapkan dengan bertambahnya Anggaran pada Tahun ini maka dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap.
2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2021 **ditargetkan sebesar 30.925 Ton/thn** atau naik 5.390 Ton dari tahun sebelumnya sebesar 36.315 ton/thn. Penetapan ini didasarkan pada laju prakiraan produksi perikanan budidaya dan target capaian berdasarkan target indikator utama Dinas Kelautan dan Perikanan 2014-2019. Program Untuk mencapai target ini



adalah program peningkatan produksi perikanan budidaya dengan dana alokasi sebesar Rp1.424.898.800.

3. Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tahun 2021 **ditargetkan sebesar 40%**. Target ini sangat realistis karena pemerintah saat ini telah memaksimalkan pemberdayaan usaha kecil dan mikro.
4. Persentase kualifikasi kelas kelompok nelayan memadai tahun 2021 **ditargetkan sebesar 5%**. Target ini sangat realistis karena pemerintah saat ini telah mempersyaratkan setiap penerima bantuan harus memiliki kelembagaan (kelompok), sehingga saat ini nelayan dan pembudidaya berusaha untuk berkelompok.
5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah tahun 2021 **ditargetkan sebesar 85% atau dalam kategori Baik**. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2021 yaitu Predikat „Baik“.
6. Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya. Untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Semakin tinggi nilai SAKIP dapat menandakan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan. Target nilai Sakip Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021 predikat rating 'BB'.



Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator sasaran tahun ini dengan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2021 serta realisasi kegiatan dan keuangannya. Pada tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 6 sasaran strategis yang akan dicapai, ke 6 sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menetapkan 6 indikator kinerja beserta masing-masing target kinerjanya.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

➤ 90% -100%	= Amat baik
➤ 80% -89%	= Baik
➤ 50%- 79%	= Cukup baik
➤ < 50%	= Kurang

Untuk mencapai setiap tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut diatas, maka diperlukan sasaran yang jelas serta indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2021, realisasi capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dari 6 sasaran strategis dan 6 Indikator Kinerja, dari 6 sasaran srategis dan 6 indikator lainnya sudah mencapai dan melebihi target (>100%).



Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Target Kinerja 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya				Perhitungan
					2020	2019	2018	2017	
1	Meningkatnya Pembangunan Sektor Perikanan	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB (ADHK)			11,41	11,41	11,41	11,35	Persentase nilai rata-rata tahun sebelumnya + nilai rata-rata tahun terakhir
2	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	30.925	36.315	14.634,06	25.097,69	24.445,1	24.363,48	Trip (perjalanan) per kapal (tergantung jenis dan ukuran kapal x produksi per kapal (kg))
3		Jumlah Produksi Ikan Bandeng	11.500	11.500	11.489,43	9.156,86	9.669,83	9.735,00	Rata-rata produksi hasil sampel (kg) x luas lahan keseluruhan (yang dikelola)
4		Jumlah Produksi Udang	6.300	6.314,04	6.302,11	993,29	976,44	972,87	Rata-rata produksi hasil sampel (kg) x luas lahan keseluruhan (yang dikelola)
5		Jumlah Produksi Rumput Laut Kering	1.200	1.299,84	1.437,73	1.289,89	1.276,33	1.430,00	Rata-rata produksi hasil sampel (kg) x luas lahan keseluruhan (yang dikelola)
6		Jumlah Produksi Ikan Nila	600	636,2	627,33	609,78	644,55	329,00	Rata-rata produksi hasil sampel (kg) x luas lahan keseluruhan (yang dikelola)
7		Jumlah Produksi Ikan Mas	300	342,4	335,78	301,48	296,82	184,00	Rata-rata produksi hasil sampel (kg) x luas lahan keseluruhan (yang dikelola)
8		Jumlah Produksi Ikan Lele	100	103,6	101,37	46,88	44,85	73,5	Rata-rata produksi hasil sampel (kg) x luas lahan keseluruhan (yang dikelola)



9		Jumlah Produksi Ikan Darat Lainnya	-	-	-	955	943	935	Jumlah produksi perikanan tangkap + jumlah produksi rumput laut x 100
10	Meningkatnya Kesejahteraan nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah Konsumsi Ikan	57,0	56,9	56,1	54,1	53,90	53,75	Jumlah ikan yg dikonsumsi / hari x 30 hari x 12 bulan
11	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Fasilitasi Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Prosentase Kelompok Nelayan yang dibina	100	100	100	100	100	100	Realisasi : target x 100
12		Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dibina	100	100	544	220	180	145	Realisasi : target x 100

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019



3.1.1. EVALUASI TERHADAP SASARAN MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SEKTOR PERIKANAN PADA CAPAIAN INDIKATOR KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB (ADHK).

Tujuan dari sasaran indikator ini dimaksudkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mendorong Pembangunan kelautan dan perikanan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberi kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya dan jasa kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, sehingga dengan suasana berusaha disektor perikanan yang aman dan lancar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada prinsipnya dapat memberi kontribusi pendapatan asli daerah sektor perikanan. Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, pada sasaran strategis meningkatnya kontribusi PAD sektor perikanan dengan indikator Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADHK) yang ditargetkan sebesar 10,80% tahun 2021, maka pada akhir tahun 2021 tingkat capaiannya sebesar 10,80%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase capaian sudah mencapai target yakni sebesar 100% artinya indikator rencana kinerja dengan realisasi kinerja sudah sejalan. Jika kita mereviu empat tahun kebelakang terhadap indikator kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Rational Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK), maka memberikan gambaran kepada kita bahwa terjadi trend peningkatan PDRB secara linear dari tahun 2014 s/d 2019 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,10% sebagaimana gambar grafik dibawah ini.



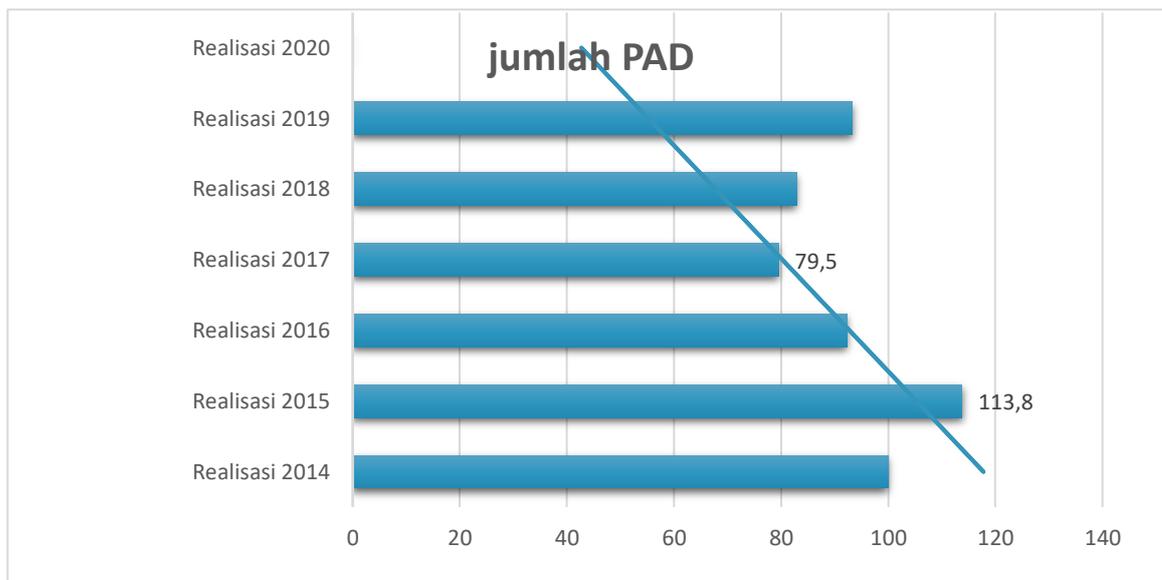
Grafik 3.1 Pertumbuhan Perikanan Tahun 2014 s/d 2020

Trend peningkatan PDRB sektor perikanan yang positif ini seperti pada grafik tersebut diatas, didukung dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun serta dilengkapi fasilitasnya melalui program Pengembangan Kawasan Budidaya air tawar melalui kegiatan kolam percontohan di delapan kecamatan yakni Bulu, Alu, matangnga, Tutar, Limboro, Anreapi, Tapango, Luyo dan Mapilli. Pengembangan kawasan budidaya payau (Tambak) dengan melakukan input teknologi dari tradisional plus menjadi semi intensif sebesar 10 ha dan sampai tahun 2020 pengembangan kawasan budidaya payau (tambak) sudah mencapai 7.115 ha, pengembangan kawasan budidaya air laut sebesar 5 ha dengan kegiatan bantuan pengembangan rumput laut dikawasan baru pengembangan seperti di wilayah Campalagian. serta semakin bertambahnya luasan budidaya perikanan. Luas kawasan budidaya rumput laut sampai tahun 2020 sudah mencapai 6.940 ha. Selain itu dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kelautan Perikanan baik dalam bentuk tugas pembantuan, maupun APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Meskipun pencapaian target indikator ini 100% dapat terwujud, tetapi dalam pelaksanaannya menemukan beberapa masalah dilapangan, khususnya terhadap masih tingginya angka penduduk miskin yang mendiami wilayah pesisir, sehingga masih dibutuhkan perhatian yang lebih fokus untuk mereduksi angka kemiskinan di wilayah pesisir serta anggaran yang cukup untuk membangun dan memberi fasilitas yang lebih banyak lagi bagi pengembangan sektor perikanan dimasa mendatang.



Grafik 3.2 Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Polewali Mandar Tahun 2014 s/d 2020



Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 93,3%. Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola langsung dari unit produksi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan dari empat tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang linear meskipun di tiga tahun terakhir agak sedikit menurun. Penurunan kontribusi PAD yang dikelola langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan disebabkan adanya beberapa pungutan leges untuk izin usaha penangkapan tidak lagi dilakukan pemungutan karena digratiskan sebagai bentuk pelayanan kepada nelayan dan jasa sewa Eksavator dengan adanya pengalihan asset tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar. Namun demikian bila dibandingkan pendapatan dari tahun ketahun (2014-2019) mengalami fluktuasi seperti tergambar dalam Gambar 2. Grafik PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014s/d 2020 diatas.

Sumber lain untuk meningkatkan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dengan memberdayakan potensi yang sementara dikembangkan misalnya Produksi Pabrik Es, Penyewaan fasilitas penunjang PPI serta Cold Storage pengolahan hasil perikanan yang diharapkan mampu memberi kontribusi terbesar pada Penerimaan Asli Daerah (PAD).



3.1.2. EVALUASI TERHADAP SASARAN MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN

Tujuan dari sasaran indikator ini dimaksudkan pemerintah kabupaten polewali mandar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mendorong pemanfaatan yang lebih optimal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan segenap potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga optimalisasi produksi perikanan dapat tercapai baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Indikator kinerja dari sasaran ini berdasarkan penetapan kinerja tahun 2021 dapat dilihat dalam matriks berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Pro- sentase
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton/thn	13.659,55	14.634,06	109,74
2.	Jumlah Produksi Ikan Bandeng	Ton/thn	9.669,83	11489,43	118,01
3	Jumlah Produksi Udang	Ton/thn	2.005,48	6.302,11	142,96
4	Jumlah Produksi Rumput Laut Kering	Ton/thn	1.289,89	1.437,73	101,05
5	Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton/thn	609,78	627,33	100,02
6	Jumlah Produksi Ikan Mas	Ton/thn	296,82	335,78	100,04
7	Jumlah Produksi Ikan Lele	Ton/thn	46,88	101,37	154,59
8	Jumlah Produksi Ikan Darat Lainnya	Ton/thn	-	-	-

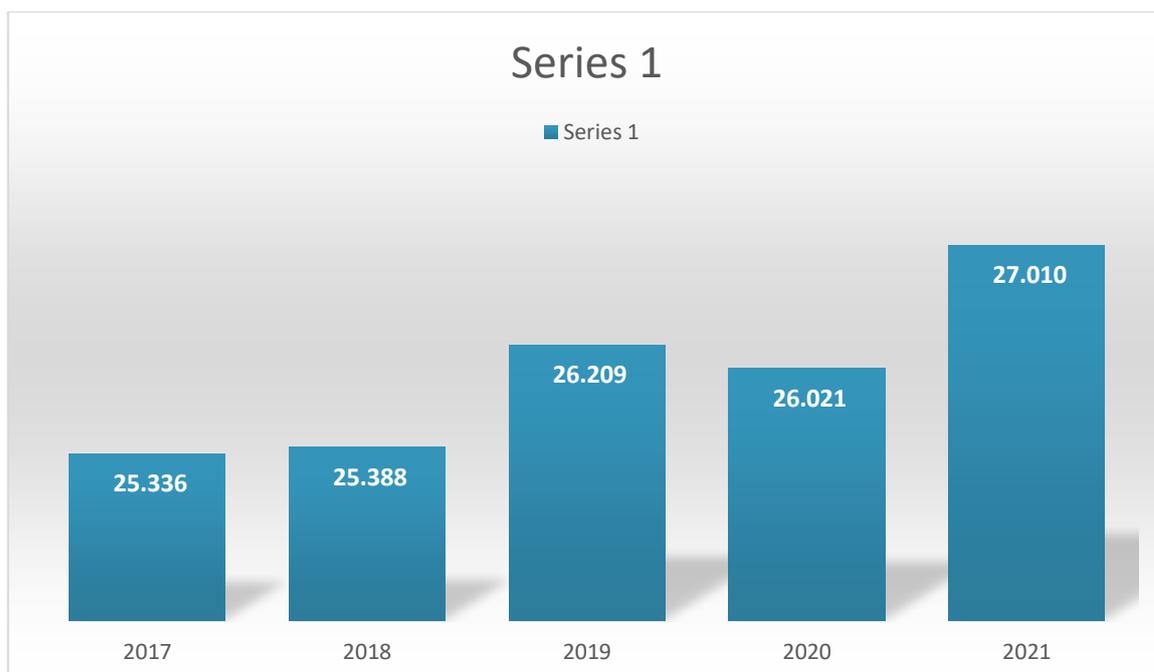


Berdasarkan Penetapan Sasaran Strategis tahun 2021 pada sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan terdapat Delapan indikator yang telah ditetapkan. Dari Delapan indikator hampir rata rata mengalami kenaikan walaupun cuman sekian persen hanya satu indikator yang mengalami kenaikan signifikan yakni Jumlah produksi perikanan tangkap Ikan lele dengan target 46,88 Ton/thn realisasi 101,37 (154,59). Hal ini dikarenakan mulai bertambahnya minat masyarakat terhadap budidaya ikan lele serta meningkatnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan lele sehingga mempengaruhi jumlah produksi. Tujuh indikator yang melebihi target 100% yakni; 1) Jumlah produksi perikanan tangkap dengan target 13.659,55 ton/tahun realisasi 14.634,06 ton/thn (109,74%); 2).Jumlah produksi ikan bandeng dengan target 9.669,83 ton/tahun realisasi 11.489,43 ton/thn (118,01%); 3) Jumlah produksi udang windu dan vanamae dengan target 2.005,48 ton/tahun realisasi 6.302,11 ton/thn (142,96%); 4) Jumlah Produksi Ikan Mas dengan target 296,82 ton/tahun realisasi 335,78 ton/thn (100,04%); 5).Jumlah produksi ikan nila dengan target 609,78 ton/tahun realisasi 627,33 ton/thn (100,02%); 6) Jumlah produksi rumput laut kering dengan target 1.289,89 ton/thn realisasi 1.437,73 ton/thn (101,05).

Pencapaian indikator yang memenuhi target tersebut didukung dengan semakin intensnya penyuluh perikanan memberikan pembinaan kepada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan meskipun dengan keterbatasan anggaran yang menyebabkan berkurangnya kegiatan untuk semua program khususnya program pengembangan perikanan budidaya dan program pengembangan perikanan tangkap serta konsep pengembangan kawasan minapolitan lebih difokuskan pada pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dengan komoditi unggulan berbasis lokal berdasarkan Surat Keputusan bapak Bupati Polewali mandar No 24 tahun 2010 tentang Penetapan lokasi Minapolitan dengan komoditi Udang/bandeng dan Rumput laut.

Grafik 3.3 Produksi Perikanan Kab. Polewali Mandar 2017 s/d 2021





Berdasarkan diagram pada gambar diatas menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir (2017 s/d 2021) trendnya mengalami peningkatan produksi rata-rata sebesar 0,68% pertahun. Meskipun terus mengalami pertumbuhan tetapi pemanfaatan sumberdaya perikanan belum optimal, disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan khususnya dengan jangkauan daya jelajah jauh, serta sarana infra struktur yang masuk banyak perlu dibenahi, contohnya berkaitan ketersediaan Solar Pocked Dealer Nelayan (SPDN) yang masih minim, kapal-kapal ukuran besar yang masih kurang serta ketersediaan sarana dan prasarana di Pangkalan Pendaratan Ikan. Keterbatasan ini juga disebabkan postur anggaran yang didanai melalui sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim, sehingga kedepan perlu kemauan yang kuat dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam memberi alokasi yang cukup untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Keberhasilan program pengembangan budidaya perikanan dapat dilihat dari indikator meningkatnya produksi perikanan budidaya di Polewali Mandar seperti terlihat dalam Tabel 7.





Tabel 3.1 Produksi Subsektor Perikanan Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 (Dalam Ton)

KECAMATAN		PERIKANAN LAUT			PERIKANAN DARAT			JUMLAH	
		Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya Rpt Laut	Perikanan Tangkap Perairan Umum	Perikanan Umum	Tambak	Kolam	Sawah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tinambung	5.268,21	-	1,34		384,15	1,56	-	5.655,26
02	Balanipa	6.527,54	-	-		-	1,07	-	6.528,61
03	Limboro	-	-	0,67		-	2,61	-	3,28
04	Tutar	-	-	0,89		-	5,11	-	6
05	Alu	-	-	-		-	17,26	-	17,26
06	Campalagian	4.025,02	-	0,96		3.138,68	57,30	2,37	7.224,33
07	Luyo	-	-	9,55		-	52,94	2,37	64,86
08	Wonomulyo	1.153,73	3.328,11	0,64		11.069,78	172,36	11,10	15.735,72
09	Mapilli	734,28	-	2,50		2.387,15	81,13	1,45	3.206,51
10	Tapango	-	-	1,55		-	93,11	4,90	99,56
11	Matakali	-	-	0,13		2.664,60	122,54	9,54	2.796,81
12	Polewali	3.868,78	7.970,86	0,62		998,28	65,28	3,95	12725,77
13	Binuang	4.696,63	1.642,05	0,69		1.532,50	82,52	4,04	7.958,43
14	Anreapi	-	-	0,33		-	88,66	12,19	101,18
15	Matangnga	-	-	0,13		-	101,43	15,85	117,41
16	Bulo	-	-			-	76,52	5,63	82,15



JUMLAH	26.272,19	12.849,65	20,00		21.828,56	1.004,72	64,64	62.323,14
--------	-----------	-----------	-------	--	-----------	----------	-------	-----------

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020



Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Tabel 7 diatas sebesar 40.424,74 ton/tahun yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 25.367,76 Ton dan produksi perikanan budidaya rumput laut sebesar 11.488,60 ton/tahn. Bila kita bandingkan jumlah rata-rata produksi perikanan di Sulawesi Barat sebesar ± 97.000 ton berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, maka dapat dikatakan Polewali Mandar merupakan penyumbang produksi ikan terbesar di Sulawesi Barat sebesar 39,13 % pertahun dari total produksi.

Produktivitas perikanan budidaya khususnya sektor pertambakan masih rendah yakni sekitar 12,794,10 ton/ha. Hal ini disebabkan metode pembudidayaan masih banyak dilakukan dengan tradisional plus dan ini merupakan tantangan terbesar bagi pembudidaya sektor pertambakan di Kabupaten Polewali Mandar. Sebenarnya produktivitas budidaya pertambakan masih dapat ditingkatkan dengan mengubah metode budidaya menjadi semi intensif dan intensif, namun tantangan terbesarnya ada disektor permodalan karena biayanya cukup tinggi.



Tabel 3.2 Luas Areal Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 (Dalam Ha)

KECAMATAN <i>District</i>		PEMELIHARAAN				PENANGKAPAN			
		Care				Keep			
		Rumput Laut	KOLAM <i>Fresh Water</i>	TAMBAK <i>Brackish</i>	SAWAH <i>Paddy Field</i>	JUMLAH <i>Total</i>	RAWA <i>Swamp</i>	SUNGAI <i>River</i>	JUMLAH <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
01	Tinambung		1,10	107,00		108,1	-	60,00	60
02	Balanipa		1,00			1,00	-	-	-
03	Limboro		5,40			5,40	-	30,0	-
04	Tutar		10,40			10,40	-	40,0	40,0
05	Alu		15,60			15,60	-	-	-
06	Campalagian		7,50	730,80	4,10	742,4	42,0	-	43,0
07	Luyo		5,50		5,00	10,5	-	428,0	428,0
08	Wonomulyo	183,20	85,50	2,633,00	15,00	2,916,7	25,00	-	28,50
09	Mapilli		60,50	523,00	3,50	587,00	-	112,0	112,0
10	Tapango		40,50		3,50	44,00	13,50	56,0	69,50
11	Matakali		60,00	660,50	17,50	738,00	6,00	-	-
12	Polewali	593,80	20,50	118,95	4,00	737,25	4,00	24,0	24,0
13	Binuang	364,00	25,50	350,07	3,50	743,07	6,00	25,0	25,0
14	Anreapi		55,00		12,00	67,00	-	15,0	15,0
15	Matangnga		45,00		18,00	63,00	-	6,0	6,0
16	Bulo		20,00		6,00	26,00	-	-	-
JUMLAH TOTAL		1,141,00	130,65	5,123,32	92,00	6,815,42	69,70	796,00	7.692,07

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018



Berdasarkan tabel 8 diatas luas areal pemeliharaan budidaya tambak seluas 5.123,32 ha, budidaya rumput laut seluas 1.141,00 ha, budidaya kolam seluas 130.65 ha. Kalau kita banding luas potensi perikanan khususnya budidaya rumput laut berdasarkan Data kajian Lipi 2002 seluas 2.930 Ha, maka masih terdapat 1.480 Ha potensi yang belum dikelola.

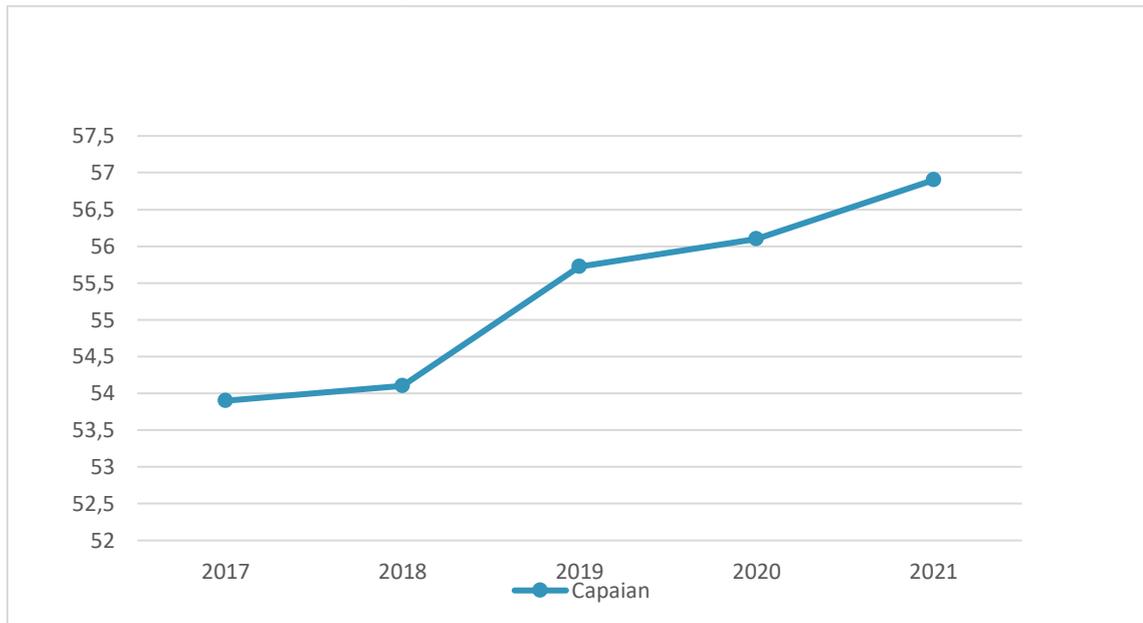
Olehnya itu upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar TA. 2021 untuk memaksimalkan potensi dan meningkatkan produksi dengan melakukan intervensi bantuan pembudidaya rumput laut pada kawasan baru pengembangan di wilayah campalagian seluas 0,5 ha sebagai uji coba (daerah percontohan) dan untuk tahun 2021 akan dilakukan pengembangan rumput laut seluas 10 ha dengan harapan produksi perikanan Kabupaten Polewali Mandar meningkat. Namun tantangan yang dihadapi adalah animo masyarakat untuk membudidaya khususnya di daerah pengembangan baru masih relatif rendah sehingga di perlukan upaya bimbingan dan pelatihan.

3.1.3. EVALUASI TERHADAP SASARAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

Tujuan dari sasaran indikator ini dimaksudkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mendorong pemanfaatan dan pemelihara daya dukung dan kualitas wilayah perairan laut dan perairan umum guna menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat perikanan. Salah satu indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan nelayan dapat diukur dengan besarnya jumlah konsumsi ikan pertahun, dimana semakin besar jumlah konsumsi ikan menunjukkan keterjangkauan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok khususnya kebutuhan protein semakin terpenuhi. Keterjangkauan daya beli ini tentu dibarengi dengan tingkat pendapatan dan hasil penjualan produksi perikanan semakin meningkat, sehingga keuntungan yang didapatkan secara sederhana dapat digambarkan akan semakin bertambah, terutama ditingkat nelayan dan pembudidaya ikan. Oleh karena itu peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana perikanan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan daya dukung agar terjadi kesinambungan pembangunan.



Grafik 3.4 Konsumsi Ikan di Kabupaten Polewali Mandar 2017 s/d 2021.



Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan gambar 5 diatas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir 2017 s/d 2021 terjadi peningkatan konsumsi rata-rata sebesar 0.56% pertahun. Untuk tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah konsumsi ikan hampir linear dengan peningkatan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Polewali Mandar yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan 0,68% pertahun.

Meskipun secara grafik jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Polewali Mandar semakin meningkat, tetapi penyebarannya tidak merata, karena jumlah konsumsi ikan terbesar ada di wilayah pesisir, sedangkan didaerah pegunungan berdasarkan data perikanan jumlah konsumsi ikan perorang pertahun relatif masih sedikit. Oleh karena itu kedepan distribusi pemasaran ikan harus mampu menjangkau kedaerah pegunungan dengan memperbanyak atau menambah armada yang mempunyai daya jelajah hingga ke pelosok pegunungan. Sehingga dukungan terhadap program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan perlu mendapat porsi



yang cukup. Selain itu Slogan-slogan” Makan Ikan Menyehatkan dan Mencerdaskan” perlu lebih disebarluaskan dan dilakukan lebih intens.

Tabel 3.3 Produksi Perikanan Komoditi Andalan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 s/d 2021 (Dalam Ton)

JENIS IKAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Tuna	3.579,00	3.474,71	3.966,46	3.916,94	2.690,05
Cakalang	4.720,81	4.845,58	5.293,90	6.269,96	6.404,24
Tongkol	2.485,81	2.571,90	2.283,6	2.309,66	3.122,55
Udang	630,00	1.964,63	2.005,48	6.302,11	6.314,04
Telur Ikan Terbang	7,65	7,65	7,7	7,7	7,7
Layang	1.328,03	1.379,04	1.783,13	1.756,31	1.286,26
Rumput Laut Kering	1.430,00	1.276,33	1.289,89	1.437,73	1.299,84
Kakap/Kerapu	200,61	228,34	304,90	352,89	562,48
Cumi-Cumi	17,3	15,18	17,86	20,6	23,78
Bandeng	9.735,00	11.152,35	11.319,64	11.489,43	11.500,92

Sumber: Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Jumlah produksi perikanan komoditi andalan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 berdasarkan tabel 9 diatas yang terdiri dari Ikan Bandeng, Cakalang, Tongkol, Tuna, Layang, Udang, Rumput Laut, Kakap/Kerapu, Cumi-Cumi dan Telur ikan terbang sebesar 33.211,86 ton/thn. Ikan Cakalang, Layang dan Tongkol, Tuna dan Ikan Bandeng merupakan komoditi ikan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Polewali Mandar. Jenis ikan ini banyak mengandung omega 3 yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak khususnya balita. Sedangkan telur ikan terbang, kakap/kerapu dan cumi-cumi merupakan komoditi yang nilai jualnya tinggi dan umumnya banyak diekspor.



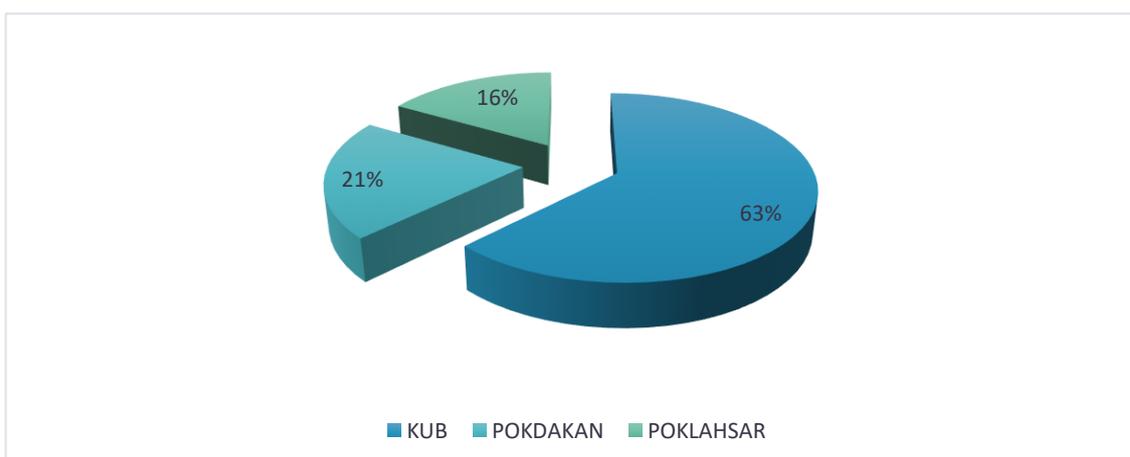
Jenis komoditi rumput laut belum banyak dimanfaatkan/dikonsumsi/diolah untuk dijadikan sebagai bahan pangan dan umumnya penggunaan saat ini lebih banyak di perdagangkan ke Makassar dan merupakan komoditi ekspor.

Tantangan terbesar yang dihadapi untuk komoditi rumput laut adalah ketidak stabilan harga dan terkadang harganya sangat anjlok karena sangat tergantung dengan permintaan dari luar negeri. Sementara upaya mengelola langsung untuk dijadikan bahan pangan belum berkembang dengan baik, karena mahalnya investasi teknologi yang digunakan untuk mengolah semisal menjadi bahan tepung. Juga kegiatan home industry untuk pemanfaatan rumput laut belum berkembang khususnya pembuatan keripik, jus, puding dll. Saat ini rumput laut banyak digunakan pada bidang farmasi dan kosmetik.

3.1.4. EVALUASI TERHADAP SASARAN MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN FASILITASI KELOMPOK NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

Tujuan dari sasaran indikator ini dimaksudkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mendorong meningkatkan kemandirian dan daya saing nelayan dan pembudidaya Ikan melalui pemberdayaan kelembagaan, peningkatan kemampuan dan keterampilan serta peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Salah satu indikator untuk melihat peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi kelompok adalah dapat diukur dengan dua indikator yakni; Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya yang dibina serta prosentase kelompok nelayan yang dibina, artinya semakin besar jumlah kelompok yang dibina dan difasilitasi tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan skill serta pengorganisasian dari masing-masing kelompok binaan yang diharapkan mereka dapat mandiri setidaknya untuk memilah dan merencanakan kebutuhannya sendiri. Dengan pembinaan yang intensif dan penambahan keterampilan melalui pelatihan diharapkan produksi perikanan dari kelompok binaan dapat bersaing ditingkat lokal maupun ditingkat nasional.

Grafik 3.5 Prosentase Jumlah Kelompok Nelayan yang didampingi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Polewali Mandar 2021.



Gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kelompok nelayan sebanyak 253 kelompok atau 63%, kelompok pembudidaya ikan sebanyak 84 kelompok atau 21% dan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebanyak 67 kelompok atau 16%.

Meskipun secara kuantitas jumlah kelompok yang dibina dan difasilitasi terus bertambah, tetapi secara kualitas masih perlu terus dilakukan pembinaan secara intensif, hingga mereka diharapkan mampu mandiri dan punya daya saing yang kuat.

Salah satu kelemahan dari sistim pembinaan kelompok ini, adalah jumlah tenaga teknis yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan masih sangat terbatas yakni untuk budidaya perikanan hanya mempunyai tenaga teknis pegawai negeri sipil sebanyak 5 orang, tenaga teknis sukarela yang didanai oleh APBD sebanyak 8 orang, tenaga teknis yang dibiayai oleh pusat (APBN) sebanyak 8 orang sehingga total tenaga teknis Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 21 orang yang memiliki kemampuan spesifikasi ilmu tersendiri. Bila dibandingkan dengan jumlah total nelayan sebanyak 10.575 orang, pembudidaya sebanyak 4.745 orang dan pengolah pemasar sebanyak 359 orang sehingga total yang harus dibina yang bergerak disektor perikanan sebanyak 15.679 orang, maka dapat disimpulkan untuk setiap 1.206 orang dibina oleh satu tenaga teknis. Ini memberi gambaran pada kita bahwa ratio pembinaan tidak seimbang dengan jumlah tenaga teknis yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan teori yang ada ratio pembinaan yang ideal adalah 1:400 artinya setiap satu tenaga teknis membina maksimal 400 orang pembudidaya/nelayan/poklahsar. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan masih kekurangan



tenaga teknis/pendamping/pembina sebanyak 256 orang yang tersebar di 16 kecamatan, dimana disetiap kecamatan seharusnya memiliki tenaga teknis/pendamping/pembina sebanyak 16 orang. Sehingga bagi tenaga teknis untuk membina kelompok nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar adalah dibagi berdasarkan wilayah kerja bukan berdasarkan kompetensi bidang (keahlian/skill) masing-masing tenaga teknis. Kedepan pemerintah harus lebih memfokuskan penambahan tenaga teknis sektor kelautan dan perikanan, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 3.4 Jumlah perahu / kapal penangkapan ikan laut dan darat dirinci per kecamatan kabupaten polewali mandar tahun 2021 (unit)

KECAMATAN District		LAUT Marine				DARAT Inland		
		PERAHU TAK BERMOTOR	MOTOR TEMPEL Out Boats Motor	KAPAL MOTOR Boats Motor ≤ 5 GT	KAPAL MOTOR Boats Motor > 5 GT	PERAHU TAK BERMOTOR	MOTOR TEMPEL Out Boats Motor	KAPAL MOTOR Boats Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
01	Tinambung	748	142	257	43	-	-	-
02	Balanipa	1,376	138	198	119	-	-	-
03	Limboro	-	-	-	-	-	-	-
04	Tutar	-	-	-	-	-	-	-
05	Alu	-	-	-	-	-	-	-
06	Campalagian	99	158	42	50	-	-	-
07	Luyo	-	-	-	-	-	-	-
08	Wonomulyo	5	70	1	-	-	-	-
09	Mapilli	55	50	-	-	-	-	-
10	Tapango	-	-	-	-	-	-	-
11	Matakali	-	-	-	-	-	-	-
12	Polewali	106	248	29	36	-	-	-



13	Binuang	60	332	24	-	-	-	-
14	Anreapi	-	-	-	-	-	-	-
15	Matangnga	-	-	-	-	-	-	-
16	Bulo	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH Total		2,449	1,138	551	248	-	-	-

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

Fasilitasi Kelompok nelayan untuk bantuan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan terus diupayakan dari tahun ke tahun melalui program pengadaan sarana dan prasarana perikanan seperti (Gillnet, Jaring, Rawai Dasar, Rumpon, GPS, Fish Finder, Mesin Katinting). Upaya bantuan mesin katinting kepada kelompok nelayan adalah dalam rangka motorisasi agar mobilisasi nelayan dalam penangkapan ikan punya daya jelajah jauh, sehingga perahu yang tadinya tak bermotor (didayung/mengandalkan layar) menjadi perahu katinting.

Namun demikian keterbatasan anggaran menyebabkan bantuan diberikan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan pengembangan kawasan potensial dan keberadaan PPI Lantora Polewali. Jumlah perahu tak bermotor yang dimiliki oleh kelompok nelayan mencapai 2.449 unit dan Dinas Kelautan dan Perikanan terus mengupayakan secara bertahap agar perahu tak bermotor menjadi bermotor/ katinting.

Selain pemberian bantuan berupa sarana kepada kelompok nelayan juga terus dilakukan upaya pembinaan dan pendampingan agar mereka dalam melakukan penangkapan tidak merusak kelestarian lingkungan atau tidak menggunakan bahan penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Tantangan terberat yang kami hadapi adalah tidak seimbang antara tenaga pendamping/ Pembina dengan jumlah nelayan yang masih perlu penambahan.



3.1.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Alokasi Anggaran : Rp. 7.689.423.161

Realisasi Anggaran : Rp. 7.518.673.186

Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Belanja Langsung

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 4.259.818,011- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.105.471.977- atau 96,38%. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program tersebut adalah:

Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Keluaran	: Jumlah Dokumen Renja/Perubahan Renja Tahunan yang tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu
Hasil	: Predikat SAKIP Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran	: 9.999.000,00
Realisasi Anggaran	: 9.998.900,00
Realisasi Fisik	: 100%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD

Keluaran	: Jumlah Dokumen
Hasil	: Predikat SAKIP Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran	: 4.998.000,00
Realisasi Anggaran	: 4.998.000,00
Realisasi Fisik	: 100%



Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran	:	Jumlah Dokumen
Hasil	:	Predikat SAKIP Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran	:	7.000.000,00
Realisasi Anggaran	:	7.000.000,00
Realisasi Fisik	:	100%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Keluaran	:	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya
- Hasil	:	
- Alokasi Anggaran	:	3.915.123.161,00
- Realisasi Anggaran	:	3.765.155.205,00
- Realisasi Fisik	:	96%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, Triwulan dan Semesteran) SKPD

- Keluaran	:	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun.
- Hasil	:	Predikat SAKIP Perangkat Daerah
- Alokasi Anggaran	:	4.992.000,00
- Realisasi Anggaran	:	4.992.000,00
- Realisasi Fisik	:	100%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Keluaran	:	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan
- Hasil	:	Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran	:	3.500.000,00
- Realisasi Anggaran	:	3.500.000,00
- Realisasi Fisik	:	100%

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Keluaran	:	Jumlah Jenis Alat tulis kantor yang diadakan
- Hasil	:	Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran	:	34.799.200,00
- Realisasi Anggaran	:	34.799.200,00
- Realisasi Fisik	:	100%

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Keluaran	:	Jumlah jenis bahan makanan dan minuman
- Hasil	:	Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran	:	20.000.000,00
- Realisasi Anggaran	:	19.980.000,00
- Realisasi Fisik	:	99,9%



Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Keluaran : Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan
- Hasil : Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran : 12.545.800,00
- Realisasi Anggaran : 12.545.800,00
- Realisasi Fisik : 100,0%

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Keluaran : Jumlah Jenis Bahan Bacaan
- Hasil : Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran : 2.000.000,00
- Realisasi Anggaran : 1.440.000,00
- Realisasi Fisik : 72,0%

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Keluaran : Jumlah SPPD
- Hasil : Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran : 120.000.000,00
- Realisasi Anggaran : 119.987.850,00
- Realisasi Fisik : 100,0%

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Keluaran : Jumlah Surat yang terkirim
- Hasil : Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran : 35.337.100,00
- Realisasi Anggaran : 35.337.100,00
- Realisasi Fisik : 100,0%

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Keluaran : Jumlah jenis komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkann
- Hasil : Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran : 23.979.750,00
- Realisasi Anggaran : 21.324.000,00
- Realisasi Fisik : 88,9%

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Keluaran : Jumlah tenaga kebersihan dan Penjaga kantor yang menerima jasa/upah.
- Hasil : Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran : 16.800.000,00
- Realisasi Anggaran : 16.800.000,00
- Realisasi Fisik : 100,0%



Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan

- Keluaran : Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara
- Hasil : Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran : 46.744.000,00
- Realisasi Anggaran : 45.613.922,00
- Realisasi Fisik : 97,6%

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya

- Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
- Hasil : Predikat Pelayanan Publik
- Alokasi Anggaran : 2.000.000,00
- Realisasi Anggaran : 2.000.000,00
- Realisasi Fisik : 100,0%

- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**, dengan Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp1.712.908.000- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.697.700,179- atau 99,11%. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program tersebut adalah:

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

- Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan
- Hasil : Persentase Kualifikasi Kelas Kelompok Nelayan Memadai
- Alokasi Anggaran : 27.198.000,00
- Realisasi Anggaran : 27.198.000,00
- Realisasi Fisik : 100,0%

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

- Keluaran : Jumlah usaha pengolahan ikan yang dikembangkan
- Hasil : Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Alokasi Anggaran : 1.173.999.600,00
- Realisasi Anggaran : 1.171.291.779,00
- Realisasi Fisik : 99,8%

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

- Keluaran : Jumlah dan jenis sarana dan prasarana
- Hasil : Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Alokasi Anggaran : 14.999.300,00
- Realisasi Anggaran : 14.999.300,00
- Realisasi Fisik : 100,0%



Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- Keluaran	: Jumlah dan jenis sarana dan prasarana
- Hasil	: Jumlah pendapatan perkapita Nelayan
- Alokasi Anggaran	: 466.000.000,00
- Realisasi Anggaran	: 453.500.000,00
- Realisasi Fisik	: 97,3%

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sub Kegiatan	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Keluaran	: Jumlah dan jenis sarana dan prasarana
- Hasil	: Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Alokasi Anggaran	: 30.711.100,00
- Realisasi Anggaran	: 30.711.100,00
- Realisasi Fisik	: 100,0%

- c. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**, dengan Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp1.424.898.800- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.424.021.880- atau 99,90%. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program tersebut adalah:

Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- Keluaran	: Jumlah dan jenis ikan air tawar yang dikembangkan
- Hasil	: Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya
- Alokasi Anggaran	: 31.200.000,00
- Realisasi Anggaran	: 31.200.000,00
- Realisasi Fisik	: 100,0%

Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- Keluaran	: Jumlah jenis kolam dan ikan air tawar yang dibudidayakan
- Hasil	: Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya
- Alokasi Anggaran	: 204.799.200,00
- Realisasi Anggaran	: 204.693.300,00
- Realisasi Fisik	: 99,9%



Kegiatan Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Keluaran : Jumlah jenis ikan pantai dan udang yang tersedia
- Hasil : Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Alokasi Anggaran : 30.400.000,00
- Realisasi Anggaran : 30.400.000,00
- Realisasi Fisik : 100,0%

Sub Kegiatan Pelayanan Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Keluaran : Jumlah jenis hasil perikanan budidaya BBI dan UPR
- Hasil : Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Alokasi Anggaran : 214.550.000,00
- Realisasi Anggaran : 214.204.180,00
- Realisasi Fisik : 99,8%

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Keluaran : Jumlah jenis hasil perikanan budidaya yang di jamin mutunya
- Hasil : Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya
- Alokasi Anggaran : 46.799.600,00
- Realisasi Anggaran : 46.799.600,00
- Realisasi Fisik : 100,0%

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana unit perbenihan dan produksi budidaya perikanan yang tersedia
- Hasil : Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya
- Alokasi Anggaran : 476.000.000,00
- Realisasi Anggaran : 475.805.000,00
- Realisasi Fisik : 100,0%

Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Keluaran : Jumlah jenis alat/bahan karantina
- Hasil : Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya
- Alokasi Anggaran : 30.000.000,00



- Realisasi Anggaran : 30.000.000,00
- Realisasi Fisik : 100,0%

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

- Keluaran : Jumlah jenis percontohan budidaya perikanan
- Hasil : Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya
- Alokasi Anggaran : 310.750.000,00
- Realisasi Anggaran : 310.569.800,00
- Realisasi Fisik : 99,9%

Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- Keluaran : Jumlah kelompok usaha perikanan dan kelautan yang ditingkatkan kapasitasnya
- Hasil : Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya
- Alokasi Anggaran : 80.400.000,00
- Realisasi Anggaran : 80.350.000,00
- Realisasi Fisik : 99,9%

- d. **Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**, dengan Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp291.798.350- dengan realisasi anggaran sebesar Rp291.479.150- atau 99,90%. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program tersebut adalah:

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- Keluaran : Jumlah jenis diservikasi produk usaha perikanan yang ditingkatkan mutunya
- Hasil : Jumlah pendapatan perkapita Nelayan
- Alokasi Anggaran : 160.000.000,00
- Realisasi Anggaran : 159.750.000,00
- Realisasi Fisik : 99,8%

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Keluaran : Jumlah usaha pengolahan ikan yang dikembangkan
- Hasil : Jumlah pendapatan perkapita Nelayan
- Alokasi Anggaran : 101.799.900,00
- Realisasi Anggaran : 101.730.700,00
- Realisasi Fisik : 99,9%



Sub Kegiatan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Keluaran	: Jumlah usaha pengolahan ikan yang difasilitasi
- Hasil	: Jumlah pendapatan perkapita Nelayan
- Alokasi Anggaran	: 29.998.450,00
- Realisasi Anggaran	: 29.998.450,00
- Realisasi Fisik	: 100,0%

Capaian keuangan terhadap belanja pegawai khususnya belanja tidak langsung atau belanja gaji pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat realisasi sebesar 96% fisik 100%. Realisasi belanja pegawai yang tidak tercapai sebesar 4% disebabkan karena asumsi kenaikan gaji pegawai negeri sipil dari penambahan pegawai baru tidak terjadi atau tidak ada penambahan pegawai, dan juga terdapat beberapa orang pegawai dinas yang meninggal dunia.

Capaian Keuangan terhadap belanja langsung yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal sebesar 96% fisik 100%. Realisasi belanja yang tidak tercapai sebesar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 4% terhadap realisasi belanja tidak langsung dan 4% terhadap realisasi belanja langsung dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa faktor-faktor Kunci Keberhasilan didalam mengantisipasi permasalahan, dan kendala Tahun 2021 antara lain:

- a. Tersedianya sumber daya ikan yang potensial dan berkelanjutan, selain itu aparat Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pembina nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan pemasaran hasil perikanan yang menguasai teknis dibidangnya dengan kerja keras dan bertanggung jawab terus berupaya melakukan pendampingan dan bimbingan.
- b. Adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum terhadap aktivitas usaha penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di sektor kelautan dan perikanan. Langkah pembinaan secara persuasif terus dilakukan untuk mencegah illegal fising dan penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap penangkapan dan pengolahan ikan.



- c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelautan dan perikanan secara bertahap yang di sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Meskipun dalam suasana keterbatasan pagu anggaran segenap potensi yang ada terus dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.
- d. Adanya dukungan permodalan bagi para pelaku ekonomi sektor kelautan dan perikanan melalui lembaga keuangan pemerintah dan swasta serta terjalinnya kemitraan nelayan dan pembudidaya ikan dengan perusahaan swasta/pemerintah.
- e. Dukungan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan yang nyata dan berbasis pada nilai-nilai lokal dalam sistim sosial budaya.
- f. Adanya konsistensi dan komitmen antar pemegang kendali dan partisipasi kelautan dan perikanan dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan di kabupaten polewali mandar.

3.2. MASALAH DAN SOLUSI

3.2.1. MASALAH

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat permasalahan yang menjadi faktor penghambat optimallisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal, disebabkan Luasnya wilayah perairan serta sarana dan prasarana infrastruktur belum memadai.
2. Modal usaha nelayan dan pembudidaya umumnya masih terbatas.
3. Produktivitas budidaya masih rendah disebabkan masih banyak pembudidaya menggunakan sistem tradisional dan sebaran penyakit masih tinggi.
4. Tingkat Pendangkalan pada muara sungai yang cukup tinggi menyebabkan kualitas air tambak menurun dan dapat menurunkan produksi tambak.



5. Sarana dan prasarana infrastruktur pendukung usaha perikanan umumnya belum memadai.
6. Terbatasnya bibit berkualitas dan bersertifikat khususnya bibit ikan dan Rumput laut.
7. Upaya pelestarian Sumberdaya Kelautan masih minim.
8. Jumlah Tenaga Teknis Kelautan dan Perikanan masih terbatas.
9. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap aktifitas perekonomian khususnya di sektor Kelautan dan Perikanan.

3.2.2. SOLUSI

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut maka hal-hal berikut diharapkan dapat menjadi solusi dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Polewali Mandar:

1. Diperlukan dana tambahan yang cukup dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.
2. Diperlukan perhatian khusus dari kementerian kelautan dan perikanan agar kiranya program bantuan Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat untuk masyarakat.
3. Diperlukan perhatian khusus dari kementerian kelautan dan perikanan agar kiranya program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyuluh perikanan terus memberikan pembinaan dan pelatihan hingga kedaerah serta optimalisasi kinerja karantina perikanan untuk mencegah penyebaran penyakit ikan.
4. Diperlukan bantuan alat berat (EXCAVATOR) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menangani tingginya pendangkalan di muara tambak.



5. Diperlukan bantuan sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi khusus di wilayah pesisir serta wilayah pertambakan dari kementerian kelautan dan perikanan.
6. Diperlukan bantuan khusus bibit unggul dari pembibitan yang bersertifikasi khususnya bibit rumput laut, benur dan nener.
7. Diperlukan perhatian khusus untuk upaya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang dananya cukup besar dari pemerintah pusat.
8. Diperlukan penambahan tenaga teknis bidang kelautan dan perikanan.



BAB IV PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Secara Umum bahwa pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada meskipun dengan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap mengacu kepada RPJP (2005-2025), RPJM (2014-2019) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.
2. Tingkat Perimbangan Bezetting dan Formasi Tenaga dan Jabatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 berkisar 76,56%.
3. Tingkat Realisasi Pencapaian Anggaran pada Program dan Kegiatan sebesar Rp. 7.518.673.186 atau 96% dan Realisasi Fisik 100%.
4. Terdapat 33 Indikator Kinerja, dan 33 Indikator Kinerja yang sudah mencapai bahkan melebihi target 100%.
5. Keberhasilan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari dukungan semua pihak.

3.2. SARAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di setiap OPD diakhir tahun hendaknya dilakukan evaluasi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD yang telah ditandatangani antara Kepala Dinas dengan Bupati Polewali Mandar yang didalamnya dengan jelas telah mencantumkan sasaran strategis, Indikator kinerja dan Target yang akan dicapai, dan sebagai motivasi kiranya dapat diberi reward (penghargaan) ataupun pun fanishment



(teguran) bagi OPD yang tidak mencapai target seperti diharapkan dalam rangka memotivasi kinerja disetiap OPD.

L A M P I R A N

